

# PERJALANAN RDA

## (Resource Description and Access) di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

R. Deffi Kurniawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

deffi\_kurniawati@yahoo.com

### Latar Belakang

Arah baru pengorganisasian informasi berdampak pada koleksi digital yang semakin pesat. Menurut Aditirto (2011: 4) *International Conference on the Principles and Development of AACR* di Toronto pada tahun 1997 menilai bahwa AACR2 merupakan standar pengatalogan yang kurang fleksibel dan tidak mampu mengakomodasi sumber baru dan tidak cocok untuk dunia digital. Diskusi mengenai revisi AACR2 dimulai tahun 1997 oleh berbagai pihak yang tergabung dalam *Joint Steering Commitee for Development of RDA* (JSC) dan masukan dari organisasi & Badan Internasional seperti *International Federation Library Asosiation* (IFLA) serta perpustakaan nasional dari negara pengguna AACR2 maupun non pengguna (Aditirto, 2011: 8).

Standar RDA dirilis sebagai alat bantu berbasis *web* (*RDA toolkit online*), RDA dibuat berdasarkan model konseptual FRBR, FRAD, dan FRSAD. Model ini merupakan konsep *entities, relationship, and attributes* yang dikembangkan oleh IFLA. Model konseptual dipandang lebih relevan di era informasi saat ini karena dapat membantu memahami karya dari suatu bahan perpustakaan.

### Tahapan Kebijakan *Resource Description and Access* (RDA)

Berdasarkan buku "*Kebijakan Penerapan Resource Description and Access* (RDA) di Indonesia" tahun 2015 Perpustakaan Nasional melakukan program penerapan RDA dalam mewujudkan pengatalogan bahan perpustakaan berbasis RDA di Indonesia, dibutuhkan dukungan, program dan kegiatan berbagai pihak. Untuk itu perlu dirumuskan sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman Penerapan RDA  
Pedoman dalam menetapkan sumber deskripsi, keterkaitan antara sumber satu

dengan yang lainnya, titik akses, serta penerapannya dalam format MARC. Adapun waktu penyusunannya dijadwalkan selesai pada tahun 2015.

2. Sosialisasi RDA  
Kegiatan sosialisasi penerapan RDA hanya dilaksanakan pada tahun 2016, dengan tahapan yang dilakukan sebagai berikut: menggandakan naskah; melakukan sosialisasi pedoman penerapan RDA; melakukan penerapan RDA sebagai standar baru pengatalogan bahan perpustakaan. Salah satu sosialisasi dilakukan melalui: (a) Mengeluarkan Surat Edaran Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang Kebijakan Penerapan RDA; (b) Sosialisasi melalui media masa; (c) Sosialisasi secara langsung, seperti: pertemuan pustakawan, organisasi profesi, dan melalui media sosial.
3. Pengembangan Sistem Aplikasi Perpustakaan  
Pengembangan sistem aplikasi *Integrated Library and Information System* (INLIS) berbasis RDA dikembangkan pada tahun 2015. Diharapkan dengan pengembangan sistem aplikasi perpustakaan INLIS yang *open source* akan mempercepat penerapan RDA di Indonesia.
4. Pengembangan Kompetensi Tenaga Perpustakaan  
Pengembangan kompetensi tersebut, akan dilakukan melalui: (a) Diklat RDA oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; (b) Koordinasi dengan asosiasi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan perpustakaan dalam menyusun kurikulum pengatalogan berbasis RDA; (c) Diklat RDA dapat dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara program ilmu perpustakaan; (d) Workshop RDA dapat dilakukan oleh organisasi profesi; (e) Magang di Perpustakaan Nasional Republik

- Indonesia (Perpusnas); (f) Bimbingan teknis RDA di Perpustakaan Nasional; (g) TOT RDA di Perpustakaan Nasional tahun 2017;
5. Penguatan Jaringan Kerja Sama Pengatalogan Bahan Perpustakaan Perpustakaan sebagai pusat jejaring dan membuat KIN Katalog Induk Nasional) akan memperkuat jaringan kerjasama pengatalogan. Kerjasama dalam pengatalogan ini dapat dimulai dari membentuk suatu forum pengatalog, atau melalui komitmen antar lembaga sebagai suatu tempat berdiskusi di antara para tenaga perpustakaan yang melakukan pengatalogan bahan perpustakaan.

Kegiatan penguatan jaringan kerjasama pengatalogan bahan perpustakaan dijadwalkan berlangsung dari tahun 2016-2020, dengan target capaian sebagai berikut: Katalog Induk Nasional berbasis RDA, Kerjasama pengolahan bahan perpustakaan (*copy Cataloging*), dan Interoperabilitas katalog berbasis RDA antar perpustakaan se-Indonesia.

RDA merupakan standar pengatalogan yang dirumuskan untuk menggantikan AACR2 yang tidak mampu menampung perkembangan dunia digital. RDA digunakan untuk menghemat titik akses sebab hasil dari RDA yaitu suatu karya yang memiliki format yang banyak sehingga mampu ditampilkan dalam satu entri. RDA dapat memberikan tampilan hasil pencarian di Online Public Access Cataloging (OPAC) secara detail.

Telah banyak tahapan yang dilakukan oleh Perpustakaan dalam rangka menerapkan RDA di Indonesia, tahun 2019-2020 merupakan tahap penguatan jaringan kerjasama pengatalogan bahan perpustakaan. Pada tahap ini sudah terbentuk KIN yang berbasis RDA, terciptanya kerjasama pengolahan bahan pustaka (*copy cataloguing*), dan terjalannya interoperabilitas katalog berbasis RDA antarperpustakaan se-Indonesia. (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2015:24). Berikut perjalanan RDA di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia:

Tabel 1. Tahap Pengembangan Awal (2020-2024)

Tahun	Uraian
2010	Penyiaran SDM, yakni dengan studi banding ke NLA Australia
2011	FGD internal, yakni di unit Bidang Pengolahan Bahan Pustaka Perpustakaan
2012	Seminar RDA, Perpustakaan melibatkan Lembaga dan Instansi terkait
2013	Kajian dan SDM, yakni Kajian Penerapan RDA dan melakukan studi banding ke NLA Australia
2014	Penyiapan dokumen, yakni menyiapkan naskah kebijakan dan pedoman

Tabel 2. RDA di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019

Tahun	Uraian
2015	Fokus pada penyusunan Kebijakan dan Pedoman RDA dengan menyiapkan aplikasi
2016	Perka Perpustakaan No. 2 Tahun 2016 tentang Kebijakan Penerapan RDA di Indonesia
2017	Fokus pada Penerapan RDA dengan aplikasi internal (INLIS); Perpustakaan mengadakan Bimtek dan diklat
2018	Penerapan di Perpustakaan Perguruan Tinggi, Dinas Perpustakaan Provinsi dengan mengadakan workshop RDA
2019	Evaluasi kegiatan, yakni penyusunan Rencana Kegiatan 2020-2024

Sumber: 6 Juli 2017 penerapan RDA di Perpustakaan

Tabel 3. Penerapan RDA di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	Uraian
2020	Penerapan RDA untuk Bibliografi Nasional Indonesia
2021	Pengembangan aplikasi ISBN untuk KDT berbasis RDA
2022	Revisi Pedoman RDA. Penerapan RDA untuk KDT
2023	Sosialisasi Pedoman RDA edisi Revisi
2024	Evaluasi kegiatan, yakni penyusunan Rencana Kegiatan 2025-2029

Sumber: Paparan Kebijakan Pengatalogan Berbasis RDA oleh Suharyanto (Yogyakarta, 2018)

Tabel 4. Perbedaan antara AACR2 dengan RDA

No	AACR2	RDA
1	Terbithanya dalam versi cetak	Terbit dalam versi cetak dan sambung jarring
2	Dibagi berdasarkan jenis bahan perpustakaan	Dikembangkan dalam bentuk netral tidak berdasarkan jenis bahan perpustakaan
3	Tingkatan deskripsi	Tidak mengenal tingkatan deskripsi
4	Penggunaan GMD <b>General Material Designation</b> atau Pernyataan bahan umum 245 ... \$h [Rekaman suara]	Tidak mengunakan GMD tapi di kembangkan berdasarkan Content type, Media type dan Carrier type 336 \$a performed music \$2 rdaccontent 337 \$a audio \$2 rdamedia 338 \$a audio disc \$2 rdacarrier
5	Singkatan [s.l. : s.n., ca 1960] Ed. 3 Cet. 4 23 hlm. : illus.; 23 cm.	Singkatan tidak dipergunakanl agi, kecuali untuk 'cm' karena merupakan symbol matematika [Tempat terbit tidak teridentifikasi: Penerbit tidak teridentifikasi, diperkirakan terbit tahun 1960] Edisi 3 Cetakan 4 23 halaman : ilustrasi ; 23 cm
6	Rule of three (aturan tiga nama) By Cornelius Snap ... [et al.]	Tidak ada lagi rule of three By Dr. Cornelius Snap, <b>Michael Cracker, Robert Pop, Jr., and Rice Krispies</b>
7	Entri utama (Main entry)	Titik akses kepengarangan (Authorised access point)
8	Deskripsi berdasarkan ISBD	Deskripsi berdasarkan Core, Core if dan Core for
9	Pilihan titik akses	Hubungan FRBR (FRBR relationship)
10	Bentuk tajuk	Atribut entitas FRAD ( <i>Attributes of FRAD entities</i> )
11	References/Rujukan	Hubungan FRAD (FRAD relationship)

Dengan adanya RDA, tugas pustakawan mengalami perubahan menjadi lebih kompleks. Hal ini sesuai pendapat Hunt (2013: 186) mengatakan bahwa, *"The Adoption of RDA will bring change to the cataloguing community: change to the rules applied in cataloguing and change to the way in which cataloguers work"*.

Berdasarkan pernyataan Hunt (2013: 186), dapat diketahui bahwa penerapan RDA akan membawa perubahan dalam komunitas pengatalogan, Perubahan pada aturan yang diterapkan dalam pembuatan katalog dan perubahan pola kerja pengatalog. Dalam RDA tugas pengatalog antara lain:

1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan hal-hal yang penting (*entitas*);
2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan hubungan (*relationship*) antar *entities*;
3. Mengidentifikasi dan mendefinisikan atribut yang merupakan karakter dari *entities*.

Dari paparan diatas dapat dikatakan bahwasanya pustakawan harus memiliki pemahaman dan keterampilan tentang konsep, bagian, dan istilah dalam RDA sebagai standar pengatalogan deskripsi. Jika melihat perkembangannya penerapan RDA di Indonesia masih perlu perhatian dan komitmen bersama, diantaranya adalah:

1. Tantangan  
Implementasi teknologi di Perpustakaan yang mempunyai potensi untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi data dalam memperoleh akses ke komputer dan teknologi bagi pengatalog dalam mengimplementasikan. Hal ini diperlukan untuk penyederhanaan dan penyesuaian system kerja, serta penyederhanaan struktur organisasi
2. Hambatan  
Hambatan ruang dan waktu yang dapat diatasi dengan teknologi, namun tetap memerlukan pemahaman dan adaptasi yang tepat dan diselesaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Peluang  
Peningkatan nilai dan efisiensi pelayanan, pengembangan sistem yang inovatif, dan peningkatan literasi teknologi. Peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung implementasi RDA dengan adanya perubahan struktur dan sistem kerja yang lebih sederhana.

Semua ini dilakukan sehingga penerapan RDA secara konsisten dan berkelanjutan perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti keberlangsungannya. Hal ini mengakibatkan berbagai program dan kegiatan pengolahan

bahan perpustakaan akan berdampak pada hasil penelusuran dan informasi yang terbatas.

Penerapan RDA sebagai aturan baru dalam pengatalogan tidak hanya direspon dengan dibuatnya kebijakan RDA Indonesia dan pedoman pengatalogan RDA oleh Perpustakaan Nasional akan tetapi diikuti dengan perbaikan dan penyesuaian perangkat lunak otomatisasi perpustakaan dengan aturan berdasarkan RDA. Pada perangkat lunak otomatisasi perpustakaan Perpustakaan Nasional yaitu Inlis yang menggunakan

metadata MARC telah melakukan perubahan terhadap kolom isian yang sesuai dengan RDA. Untuk mendukung penerapan RDA di Indonesia, pedoman telah dikembangkan untuk memberikan petunjuk dalam mengatalog bahan perpustakaan. Pedoman ini menjadi acuan bagi pustakawan di Indonesia untuk memastikan konsistensi dan standarisasi dalam praktik katalogisasi. Untuk menindaklanjuti program penyebaran pengatalogan berbasis digital ini Perpustakaan Nasional telah melakukan rencana lanjutan pengenalan dan sosialisasi RDA.

## Workshop Pengolahan Bahan Perpustakaan Berbasis RDA Tahun 2017-2024

Tabel 5. Workshop Pengolahan Bahan Perpustakaan Berbasis RDA Tahun 2017-2024

NO	TAHUN	DAERAH TUJUAN
1	2017	(1) UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno; (2) UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta; (3) Jawa Barat
2	2018	(1) Banten; (2) Kalimantan Tengah; (3) DKI Jakarta (peserta pustakawan di Perpustakaan Nasional); (4) NTB; (5) Sulawesi Selatan; (6) Bengkulu
3	2019	(1) DKI Jakarta; (2) NTT; (3) Sumatra Utara; (4) Kalimantan Barat; (5) Sumatra Selatan; (6) Sulawesi Tengah; (7) Bangka Belitung
4	2020	Aceh; (2) Kalimantan Timur; (3) Jawa Timur; (4) Sulawesi Utara; (5) Jawa Tengah *Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan karena adanya covid-19.

Sumber: TOR dan RAB Bidang Pengolahan hasil revisi Bidang Pengolahan Bahan Pustaka, 2020

Untuk menjawab tantangan dalam penerapan RDA salah satunya mencakup kebutuhan akan pelatihan dan peningkatan kapasitas pustakawan, serta kebutuhan akan sistem perpustakaan dan infrastruktur untuk mendukung transisi menuju RDA. Selain itu, pertimbangan lain adalah proses implementasi yang perlu didukung dalam pengolahan bahan perpustakaan. Penting bagi perpustakaan dan pustakawan di Indonesia untuk selalu mengikuti perkembangan terkini dan praktik baik dalam penerapan RDA.

Selain itu pertukaran metadata antara perpustakaan secara nasional dan internasional dapat dengan mudah dipahami dan digunakan oleh perpustakaan lainnya. Ini memungkinkan kolaborasi dan pertukaran metadata atau informasi yang lebih efektif antara perpustakaan, serta memfasilitasi akses bahan perpustakaan bagi pemustaka. Urgensi implementasi RDA dapat dicapai melalui dukungan program dalam pengatalogan berbasis RDA dan kolaborasi dengan organisasi serta jaringan perpustakaan internasional. Adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak akan

tercipta kemudahan akses informasi yang pada akhirnya informasi dimanfaatkan oleh masyarakat dan peningkatan indeks kegemaran membaca.

### Penutup

Keberadaan pengorganisasian informasi berbasis RDA diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pustakawan dalam melakukan pengolahan bahan perpustakaan bentuk untuk memenuhi kebutuhan emustaka. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 2 Tahun 2016 tentang Kebijakan Penerapan RDA di Indonesia dan pedoman RDA menjadi acuan bagi pustakawan di Indonesia untuk memastikan konsistensi dan standarisasi dalam praktik katalogisasi. Namun demikian, perlu adanya monitoring dan evaluasi hasil kebijakan yang telah dibuat, sejauhmana aturan yang dibuat itu dapat terlaksana secara komprehensif. Dukungan, kolaborasi dan kerjasama dari Perpustakaan Nasional dengan perpustakaan nasional di negara lain yang telah mengadopsi RDA juga telah memberikan solusi dan pembelajaran bagi implementasinya.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Masykuri. 2015. Makalah Kebijakan Penerapan *Resource Description and Access* (RDA) di Indonesia. Disampaikan pada Run Down Training Resources Description & Access (RDA). Depok.
- American Library Association. 2011. *Resource Description & Access*. Chicago : ALA Press.
- Hunt, Stuart. 2013. RDA : an innovation in Cataloguing, *Insights-26* (2), July 2013
- Irham Hanif N, 2016. Kesiapan Perpustakaan Nasional RI dalam Penerapan Resource Description and Access (RDA) di Indonesia. Depok : Universitas Indonesia
- Oliver, Chris. 2010. *Introducing RDA : a guide to the basics*. Chicago : ALA
- Perpustakaan Nasional RI. 2020. *Kerangka Acuan Kerja / Term Of Reference (Tor) Pusat Pengembangan Koleksi Dan Pengolahan Bahan Pustaka Tahun 2020*. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI
- \_\_\_\_\_. 2019. *Pedoman RDA (Resource Description & Access)*. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI
- \_\_\_\_\_. 2015. *Kebijakan Penerapan Resource Description and Access (RDA) di Indonesia*. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI
- Suharyanto. 2018. Pemaparan Ppt Kebijakan Pengatalogan Berbasis RDA (Yogyakarta, 2018)
- \_\_\_\_\_. 2011. "RDA (Resources Description and Access) Standar Pengatalogan baru perubahan dari AACR2". <https://docplayer.info/46762243-Rda-resource-description-and-access-standar-pengatalogan-baru-perubahan-dari-aacr2.html>. diunduh tanggal 1 November 2023
- Sujoko. 2018. Tesis: Analisis Pemahaman Pusatakawan Terhadap Pedoman Katalogisasi Resource Description and Access (studi kasus di Perpustakaan Unair Surabaya dan ITS Surabaya). Diunduh tanggal 2 November 2023
- Sulistyo Basuki berjudul "Tinjauan teoritis Resource Description and Access (RDA). <https://duniaperpustakaan.com/2014/10/tinjauan-teoritis-tentang-rda-resource-description-and-access.html>. Diunduh tanggal 2 November 2023